

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG ISLAM DAN PLURALITAS

Zainal Abidin

Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University
Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan - Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

This article clarifies a research that concerned with Wahid's thoughts and actions that saw Islam from its basic value, not merely as a symbol. Therefore, Wahid presented Islam from democratic and cultural sides. To present the philosophical analysis of Wahid's thoughts, the research applies hermeneutics approach and library research, especially reading Wahid's books as the primary sources, and others' books related to Wahid's thoughts as the secondary sources. It can be concluded that Islam presented by Wahid is the Islam that relates to softness, adoring loves, defending the weakness and minority, sustaining to lead the justice, having faith and honesty, tolerance, inclusive, and showing pluralities.

Keywords: *Islam, Islam basic value, plurality*

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan penelitian tentang pemikiran dan tindakan Wahid yang lebih menekankan keislaman pada nilai dasar Islam, bukan pada simbol belaka. Karena itu, Wahid menampilkan Islam pada wajah demokrasi dan kebudayaan. Sebagai suatu analisis filosofis terhadap pemikiran Wahid, secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik (hermeneutics approach) dan dalam pencarian data menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara membaca buku karya Wahid sebagai data primer, dan buku karya pengarang lain yang berhubungan dengan telaah ini sebagai data sekunder. Disimpulkan bahwa Islam yang ditampilkan oleh Wahid adalah Islam yang penuh dengan kelembutan, Islam yang diliputi oleh cinta-kasih, Islam yang membela kaum yang lemah dan minoritas, Islam yang senantiasa menegakan keadilan, Islam yang setia pada kejujuran, dan Islam yang toleran, inklusif dan pluralis.

Kata kunci: *Islam, nilai dasar Islam, pluralitas*

PENDAHULUAN

Wahid adalah sebuah fenomena yang tidak saja menarik, tetapi juga unik dan membingungkan, baik dalam wacana pemikiran keagamaan (baca: Islam), budaya, maupun politik di Republik Indonesia ini. Kita sepakat bahwa Abdurrahman Wahid adalah seorang sosok yang *nyeleneh*. Dalam Bahasa Indonesia, *nyeleneh* berarti sesuatu yang berhubungan dengan pikiran dan tindakan yang tidak umum, secara tradisi, budaya, dan sosial-kemasyarakatan, bahkan juga sosial-keagamaan. Untuk memahami *kenyelenehan* Wahid, bukanlah usaha yang mudah, karena dia selalu melakukan lompatan aksi dan pemikiran yang tak bisa ditebak oleh para pengamat, bahkan tulisan beliau pun sangat kompleks (tidak terfokus pada disiplin ilmu tertentu) dan materinya boleh dikata komprehensif, menarik, tajam, dan selalu mengandung gagasan-gagasan cerdas, tetapi tetap saja masih menyisakan ruang untuk bertanya akibat penulisannya yang singkat dan kadang terkait dengan peristiwa atau wacana yang *ngetren* saat itu. Untuk memahami sosok Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, secara utuh, sebagaimana dijelaskan oleh Hairus Salim dan Nuruddin Amin, harus dilakukan oleh banyak pengamat dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam pandangan penyusun, untuk lebih memahami Gus Dur, pertama kali harus memahami NU (Nahdhatul Ulama) terlebih dahulu karena NU sebagai habitat dan jati diri Gus Dur. Karena bukan saja secara geneologis, baik dari pihak ayah maupun ibu merupakan keturunan pentolan-pentolan NU. Tetapi juga, dia telah menjadi nahkoda yang handal mengendarai bahtera NU mengarungi samudra-samudra yang dikelilingi oleh topan dan badai. Bukan suatu yang salah bila dikatakan, "*Gus Dur besar karena NU dan NU besar karena Gus Dur*". Boleh jadi, Gus Dur yang kita kenal sekarang takkan pernah *exist* sebagai tokoh nasional maupun internasional tanpa kehadiran NU di sisinya. NU tidak saja telah membidani dan membesarkan Gus Dur tetapi juga mengharumkan namanya seantero jagad Nusantara. Boleh jadi, NU akan tenggelam dalam dunianya sendiri tanpa kehadiran Gus Dur.

Untuk memahami Wahid sebagai figur religius sangat penting juga untuk mengapresiasikannya sebagai seorang intelektual, karena hampir tidak mungkin untuk memahami secara sepenuhnya, jika tidak menghargai keyakinan agamanya, tanpa penghargaan terhadap sisi intelektual. Tanpa penghargaan terhadap sisi intelektualnya tersebut tidak akan pernah sampai pada pemahaman yang memadai tentang jalan pikirannya.

Dari tulisan yang diambil dari berbagai sumber, terbaca bahwa Wahid sangat kritis terhadap negara dan agama (baca: Islam). Perjuangannya yang gigih dalam menegakkan demokrasi, dan pemikirannya di luar kebiasaan umum selalu diposisikan sebagai "pesaing politik" dari negara, khususnya di zaman Orde Baru. Dalam hal agama, tema yang paling jelas muncul dalam tulisan Wahid adalah bahwa Islam adalah keyakinan yang menebar kasih sayang, yang secara mendasar toleran dan menghargai perbedaan, sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya Islam adalah keyakinan yang egaliter, keyakinan yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan yang tidak adil, karena alasan kelas, suku, gender, atau pengelompokan-pengelompokan lain dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah alasan untuk memilih Wahid sebagai topik kajian utama dalam tulisan ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah: Aspek apa saja yang ter-cover pada pemikiran Wahid tentang Islam dan pluralitas; dan bagaimana relevansi pemikiran Wahid tentang Islam dan pluralitas bagi kehidupan keagamaan di Indonesia pada masa mendatang.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan pokok di atas, dan apakah gagasan-gagasan pemikiran Wahid tentang Islam dan pluralitas tersebut dapat menjembatani

kesenjangan antar umat beragama. Pada sisi lain, kajian ini ingin menyelidiki kontribusi pemikiran Wahid tentang Islam dan pluralitas tersebut untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya, pemikiran inklusifisme dan pluralisme dalam Islam demi kemajuan masyarakat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Sebagai suatu analisa-filosofis terhadap pemikiran Wahid, secara metodologis penelitian ini menggunakan *pendekatan hermeneutik (hermeneutics approach)*. Salah satu *pendekatan hermeneutik* adalah: adanya kesadaran mendalam bahwa untuk menangkap *sebuah teks* tidak bisa hanya mengandalkan pemahaman gramatika kebahasaan, melainkan memerlukan data dan imajinasi konteks sosial serta psikologis baik itu si pembicara (pengarang) maupun pendengar (pembaca). *Pendekatan hermeneutik* yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *hermeneutik gramatikal, hermeneutik historical, dan hermeneutik filosofi*. Yang *pertama*, berfungsi untuk menelusuri segala yang berkaitan dengan kebahasaan sehingga bisa mengartikan teks. Yang *kedua*, berfungsi untuk mencari sejarah, karya, dan pengarang. Sedangkan yang *ketiga*, berfungsi sebagai kendali penalaran dari kedua bentuk interpretasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam: Antara Keyakinan-Moral Versus Kelembagaan

Hakikat Islam adalah ketundukan dan kepatuhan hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan penyerahan diri secara totalitas tanpa reserve. Sikap ini, sebagai manifestasi dari hati nurani yang paling dalam tanpa adanya paksaan, agitasi maupun intimidasi, bahwa sebagai makhluk Tuhan akan senantiasa mengikuti segala hukum dan ketetapan-Nya. Memeluk agama Islam bagi Abdurrahman Wahid berarti ber-Islam, dan bukan memutlakkan Islam sebagai satu-satunya nama agama. Karena semua agama, tegasnya, ditentukan oleh keikhlasan dan kesungguhan pemeluknya. Dalam pengamatan Said Aqiel Syiradj, tidak mustahil orang yang dalam pengakuannya secara formal sebagai pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Konhuchu ataupun lainnya, namun hakikatnya dia itu ber-Islam. Allah tidak menuntut manusia untuk memeluk Islam secara formalitas, mengikrarkan syahadat tetapi hatinya justru bertolak belakang. Karenanya simbol-simbol seperti sorban, jubah, peci, kubah, bukanlah standar Islam, esensinya hanya sekedar *syi'ar* dan selebihnya rapuh bagaikan buih.

Bagi Wahid, Islam adalah agama kasih sayang, agama toleran, agama keadilan dan sekaligus agama kejujuran. Artinya, Islam adalah keyakinan yang egaliter, yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan zalim (lawan adil), karena alasan agama, suku, ras, gender, status sosial atau pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat. Bagi Wahid, Islam adalah keimanan yang mengakui bahwa dalam pandangan Tuhan, semua manusia adalah setara, bahkan status muslim dan non muslim pun setara. Pandangan Wahid tentang Islam tersebut oleh Greg Barton disejajarkan dengan prinsip dasar Eropa Kristen dan Yahudi di abad Pencerahan.

Wahid menghayati Islam sebagai agama yang menuntut sikap toleran dan besar hati terhadap agama lain. Dari pernyataan di atas seakan-akan Wahid ingin menyatakan bahwa seluruh agama, sungguhpun secara formalitas peribadatan (baca: eksoteris) memiliki perbedaan, pada hakikatnya hanya ingin membentuk sosok *al-insan al-kamil* (manusia paripurna) yang memiliki *akhlaq al-karimah* (moralitas). Meski demikian, perbedaan eksoterik dalam realitas sehari-hari justru sering

ditonjolkan dan dibesar-besarkan, sementara elemen esoterik agama, semisal penegakan supermasi hukum, sikap jujur, kebebasan berekspresi, dan lainnya, justru dimanipulasi dan dinafikan.

Penonjolan sisi eksoterik tersebut di atas, selain tidak akan menyentuh nilai-nilai agama yang sesungguhnya, juga akan mengobarkan sikap antipati antarpemeluk agama. Penonjolan legal-formal agama akan membawa imbas pada pensakralan dan politisasi superioritas masing-masing agama, sehingga fanatisme pemeluknya akan menjadi membara. Tragedi Perang Salib merupakan salah satu contoh politisasi yang memakai label agama “Islam-Kristen”. Ketegangan tersebut tidak hanya sebatas relasi antarpemeluk agama, hubungan intern pemeluknya pun semakin terbus dengan perbedaan-perbedaan legal-formal yang subjektif. Di tubuh umat Islam, insiden *al-Fitnah al-Kubra* yang meletus empat dasawarsa sepeninggal Nabi Muhammad s.a.w. merupakan contoh konkret legalitas politik aliran dalam intern agama. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan keretakan para raja di Jawa yang memoles kekuasaannya dengan simbol Islam.

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, agama-agama begitu juga dengan Islam, merupakan kesadaran individu dan urusan pribadi. Oleh karena itu, tidak perlu diformalkan. Wahid sangat menentang kelembagaan agama apa pun, begitu juga dengan Islam. Menurutnya, apabila agama diformalkan akan berakibat eksklusif, tidak toleran, dan tidak adil kepada mereka yang berlainan paham, terutama kepada umat yang tidak seagama. Dia menjelaskan:

”Sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita tentang kelembagaan agama. Betapa hebatnya sebuah agama sekalipun, pendiriannya tidaklah mengajarkan orang untuk mencintai kelembagaan apa pun. Yang disampaikan adalah kebenaran, yang dalam Islam berupa tauhid (ajaran tentang keesaan Tuhan dan keutusan Muhammad SAW). Atas dasar itu, segala macam institusi yang mengatasnamakan Islam sebenarnya hanya bersifat perkiraan (ijtihad) belaka.”

Kelembagaan agama, khusus dalam kasus Islam, akan mempersempit peran Islam itu sendiri dan begitu juga dengan kaum Muslim. Padahal kaum Muslim menyakini dengan benar bahwa Islam itu adalah *rahmatan li al-‘alamin*, sebagai rahmat bagi semesta. Karena itu, Islam seharusnya dimasukkan ke berbagai macam aspek kehidupan, tidak harus dilembagakan. Pelembagaan itu sendiri berarti membatasi diri, dan ini akan merugikan Islam dan kaum Muslim. Selain itu, kelembagaan tersebut akan menafikan kelompok lain di luar mereka yang tidak sepaham, padahal Islam dan kaum Muslim tidak pernah dibatasi oleh kelembagaan tersebut.

Karena itu, Wahid tetap menganggap seorang itu Muslim walau dia tidak melaksanakan ajarannya, seperti shalat, zakat, atau puasa. Wahid tidak menafikan keislaman yang hanya pengakuan atau kepercayaan, keyakinan terhadap keesaan Tuhan dan kerasulan Muhammad, tanpa diiringi dengan pelaksanaan terhadap Syari'at Islam. Baginya, orang itu tetap sebagai seorang muslim. Karena itulah Wahid menjelaskan:

”Muslim tidak terbatas hanya dengan menyebutkan Abdurrahman Wahid Ketua Umum PBNU, Nurcholish Madjid orang HMI, Amin Rais Muhammadiyah, Lubis-Wasliyah, atau Latief Muchtar-Persis. Tetapi mereka-mereka yang ”KTP”, tidak pernah ke mesjid, tidak pernah shalat, namun selama ini merasa Muslim, mereka berhak untuk berbicara dan menyumbangkan pikiran atas nama Islam.”

Di sini, terlihat jelas betapa Wahid ingin menjadikan Islam tidak hanya milik bagi mereka yang secara formalitas mengerjakan amalan-amalan Islam, tetapi juga bagi mereka yang mengakui Islam sebagai keyakinannya, walaupun belum melaksanakan amalan-amalannya. Bila dilihat secara teologi, pandangan Wahid tersebut mengikuti konsepsi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, sebagaimana juga dalam NU. Dalam pandangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dijelaskan bahwa keyakinan adalah *tashdiqun bi al-qalb*, membenaran dengan hati.

Keimanan seorang, dalam pandangan Wahid selalu berproses, karena itu jangan cepat mengambil simpulan apalagi mengkafirkannya. Dalam proses itulah orang akan mencapai kebenaran yang dicarinya, baik itu yang secara formal beragama Islam maupun bukan. Wahid menjelaskan:

"... Padahal, agama senantiasa menganjurkan agar selalu berproses. Bukankah kata Islam yang berarti penyerahan menunjukkan agama sebagai proses, bukan hasil akhir? Dalam proses itulah orang akan mencapai kebenaran yang dicarinya, baik itu Islam maupun bukan. Bagi saya, Islam tetap yang terbaik, tapi tidak menghalangi pemikiran bahwa agama lain pun baik."

Pemikiran Wahid tentang Islam sebagai agama proses, dapat ditelusuri konsepsinya pada seorang tokoh intelektual Muslim asal Sudan, Mahmoud Mohamed Taha. Dalam pandangannya, Islam adalah suatu proses intelektual dimana seorang hamba berproses dalam penghambaan di suatu jenjang yang terdiri dari tujuh tahapan, yaitu: *al-islam, al-iman, al-ihsan, 'ilm al-yaqin, 'ilm 'ain al-yaqin, 'ilm haqq al-yaqin, dan al-islam*. Islam pada tahap awal, hanyalah kepatuhan eksternal yang berurusan dengan ucapan dan tindakan. Sedangkan Islam pada tahap akhir merupakan kepatuhan eksternal dan internal (sejati) sekaligus, dan merupakan penyerahan dan kepatuhan intelegensia (dengan pengetahuan), serta penerimaan atas Allah baik secara pribadi maupun umum. Islam yang dimaksudkan Wahid di sini, adalah Islam pada tahap akhir.

Islam pada tahap akhir inilah yang menjadi keyakinan Wahid, karena itulah dia memaknainya sebagai keyakinan yang menebar kasih sayang, toleran, dan menghargai perbedaan. Bagi Abdurrahman, Islam adalah keimanan yang mengakui bahwa dalam pandangan Tuhan semua manusia adalah setara, baik muslim maupun non-muslim, Wahid menjelaskan:

"Saya menganggap semua agama ditentukan oleh keikhlasan dan kesungguhan pemeluknya. Itulah yang saya minta untuk dihormati, bukan penafian satu sama lain".

Kendati pandangan Wahid tersebut dipandang liberal oleh sebagian kaum Muslim, namun dia tetap menuntut agar kaum Muslim tetap melaksanakan Syari'at Islam (Hukum Islam) sebagai konsekuensi kepatuhan dan ketundukannya kepada Tuhan. Namun dia mengingatkan, bahwa Islam jangan hanya dijadikan sebagai seremonial keagamaan belaka, justru kaum Muslim harus menegakkan Syariat Islam secara fungsional. Lebih jauh lagi dia menegaskan, bahwa pelaksanaan Syari'at Islam tersebut, harus melihat situasi dan kondisi. Dalam kehidupan berbangsa dan negara umpamanya, kaum Muslim cukup melaksanakan partikel dari Syariat Islam yang dapat diterima oleh semua pihak, sedangkan selebihnya dijadikan etika bagi masyarakat Muslim. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Wahid meletakkan Islam dengan cara mencari substansi ajaran, dan bukan institusinya. Inilah yang kemudian pertama-tama bisa menjadi inti sekaligus menjadi jembatan untuk melihat di antara perbedaan semua pandangan agama, baik Muslim maupun non-Muslim.

Wahid melihat bahwa Islam di Indonesia baru pada tataran aspek seremonial, belum pada aspek fungsional, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Gerakan-gerakan Islam, yang katanya memperjuangkan kepentingan Islam melalui negara, kebanyakan hanyalah memperjuangkan kepentingan politik atau ideologis yang mereka miliki sendiri. Kepentingan Islam justru akhirnya tertutupi oleh kepentingan sendiri. Sedangkan corak fungsional yang diperjuangkan oleh gerakan hak asasi manusia dan corak hukum yang diinginkan, ternyata diperjuangkan oleh mereka yang tidak menggunakan wawasan agama, paling tidak formalitas hukum Islam, formalitas keadilan, dan formalitas demokrasi, yang semuanya merupakan perwujudan hak-hak asasi manusia yang bersederajat dan berkedudukan sama. Akan tetapi, inilah yang tidak berarti hingga saat ini, karena gerakan Islam pada umumnya baru tersentuh oleh aspek ornamental belaka dari pelaksanaan agama samawi. Menurut Wahid, yang harus diambil adalah pendapat kedua, karena pendapat pertama berarti formalisasi agama dalam kehidupan bernegara.

Karena hal tersebut di atas, Wahid menjelaskan, bukankan lebih praktis memperjuangkan Islam melalui hak asasi manusia dan persamaan kedudukan seluruh warga negara, daripada menjelaskan sebaliknya? Demikian pula, bukankah pemerintahan *despot* dan tiran yang dikutuk oleh hak asasi manusia dan demokrasi, juga ditolak oleh hukum Islam.

Islam, sebagai agama yang sempurna sebagaimana dijelaskan oleh *QS al-Ma'idah (5): 3*, diyakini benar kebenarannya oleh Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, konsepsi kesempurnaan tersebut agak berbeda dengan tokoh-tokoh intelektual muslim lainnya. Dalam pandangan Wahid, "secara prinsip Islam sudah sempurna. Ketika dijabarkan secara operasional ia harus merambah lagi". Kesempurnaan Islam terletak pada potensinya untuk menampung masukan-masukan secara kontinuitas (terus menerus) sebagai bagian dari proses penghadapan Islam pada tuntutan zaman. Maknanya kesempurnaan Islam terletak pada keterbukaan terhadap pengembangan wawasan baru secara terus menerus dalam menggandeng zaman yang selalu berkembang. Tentu saja hal ini didorong dari dan oleh al-Quran dan Sunnah Rasul s.a.w. itu sendiri.

Kelembagaan Islam, berarti menolak kesempurnaan Islam. Karena kelembagaan itu sendiri, sesuatu yang menunjukkan kekurangan, kelemahan, dan salah satu bentuk ketidakpercayaan diri. Padahal Islam itu sempurna dan tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Bukankah yang sempurna itu yang terus berproses? Yang percaya pada kesempurnaan dan kehebatan Islam, bukankah justru orang yang meletakkan Islam pada kerangka dialog dengan umat lain secara apa adanya dan bukan pada kelembagaannya. Islam tak perlu dilindungi, karena memang akan menang dalam keadaan apapun.

Betul Rasulullah s.a.w. memang pernah berkata; "Islam unggul dan tidak dapat diungguli", tetapi pemaknaannya tidak harus literal. Bukan berarti Islam tidak memerlukan pandangan dari luar, pandangan dari luar tetap diperlukan besar kemungkinan apa yang diterima dari luar itu justru sebagai pengembangan gagasan yang semula berkembang dalam lingkup lebih kecil dalam ajaran Islam sendiri, tetapi terlupakan. Tidak dapat dibantah lagi memang konsep Islamlah yang terbaik, tetapi bagaimana dengan umatnya dewasa ini. Unggulkah? Terbaikkah? Sempurnakah? Itulah pekerjaan rumah buat umat Islam.

Islam dan Keadilan: demi Demokrasi Indonesia

Republik Indonesia, adalah negara kepulauan yang dihuni oleh berjuta-juta manusia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Tidaklah tanpa alasan jika semboyan resmi negara ini, *Bhinneka Tunggal Ika*, kesatuan dalam keberagaman, dijadikan sebagai semboyan resmi negara, yang diletakan di bawah lambang burung garuda. Sudah seharusnya kaum Muslim sebagai mayoritas bangsa ini, lebih kurang 85 persen bekerja sama dengan golongan minoritas yang lain untuk menjaga kesatuan, persatuan, dan keutuhannya dengan segenap kemampuan yang mereka miliki.

Menurut Wahid, demokrasi merupakan salah satu cara yang paling tepat, walaupun itu bukan segala-galanya, untuk mewujudkan tujuan tersebut. Wahid menambahkan, karena dalam demokrasi ada kesamaan derajat dan kedudukan untuk semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, jenis kelamin, dan bahasa ibu. Maka karena itu, demokrasi merupakan persyaratan utama bagi kejayaan sebuah bangsa. Komitmen Wahid terhadap demokrasi tak dapat dibantahkan, di awal tahun 1990-an, tatkala oleh –tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Wahid diminta memilih antara menjadi Ketua PBNU atau Forum Demokrasi, dengan tegas Wahid memilih menjadi ketua Forum Demokrasi. NU pun kemudian mengalah. Hal senada juga dikatakan oleh J. Kristiadi, "hal yang sangat spektakuler dari Gus Dur adalah bahwa dia akan menempuh risiko apa saja untuk menegakkan demokrasi. Saya mengenalnya sebagai seorang yang rela mengorbankan kenikmatan dirinya untuk sesuatu yang dia yakini dan dia anggap baik untuk kemajuan bangsa."

Dalam pandangan Wahid, pada umumnya, agama dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi tegaknya demokrasi, manakala agama tersebut berwatak membebaskan dan secara esensi agama tersebut mampu memperbaiki kehidupan manusia. Hal ini, berlaku juga bagi agama Islam, karena kedua watak tersebut sangat melekat pada agama Muhammad s.a.w. ini. Kesimpulan Wahid, bahwa Islam adalah agama demokratis, bukannya tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang Wahid ungkapkan, yaitu:

Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengetahuan agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak demikian, maka hukum dalam Islam tidak jalan dalam kehidupan. Kedua, Islam memiliki azas permusyawaratan, "Amruhum syura' bainahm", artinya perkara-perkara mereka dibicarakan antara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini pada hakekatnya adalah persiapan untuk kehidupan akhirat, "Wal akhiratu khairun wa abqa", akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Karena itu kehidupan tarafnya tidak boleh tetap, harus tetap ada peningkatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik di akhirat.

Karena Islam sebagai agama demokratis, maka seharusnya juga kaum Muslim menjunjung tinggi dan menegakkan keadilan, dan demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata 'adil' diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak, 2) berpihak kepada kebenaran, dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Islam sebagai agama sempurna, tidak menafikan hal ini, al-Qur'an menjelaskan, "Berlaku adilah! Karena adil lebih dekat kepada taqwa", (*QS al-Maidah [005]: 8*). Keadilan ini, diungkapkan oleh al-Qur'an tidak hanya dengan kata *al-'adl*, tetapi juga kata-kata *al-qisth*, dan *al-mizan*, yang diulang berkali-kali. Menurut Quraisy Shihab, keadilan mencakup semua aspek kehidupan, baik aqidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci. Kebencian sekalipun tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk untuk mengorbankan keadilan, walaupun kebencian itu tertuju kepada non-Muslim, atau didorong oleh upaya memperoleh ridha Allah. Itu sebabnya Rasul s.a.w. mewanti-wanti agar, "Berhati-hati terhadap doa (orang) yang teraniaya, walaupun dia kafir. Karena tidak ada pemisah doanya dengan Tuhan".

Ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi s.a.w. yang berbicara keadilan sifatnya berlaku umum terhadap umat manusia, tidak membedakan muslim atau non-Muslim. Tidak ditemukan ketentuan yang mengatur keadilan khusus bagi orang-orang Islam, sementara itu, orang-orang non-Islam boleh diperlakukan tidak adil. Apalagi jika diingat bahwa menegakkan keadilan itu akan berujung pada terwujudnya rahmat sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*), yang menjadi misi ajaran Islam.

Mengenai wawasan keadilan, Abdurrahman Wahid menghendaki keadilan dalam penerapan yang luas. Wawasan keadilan itu, menurutnya, tidak hanya dibatasi pada lingkup mikro dari kehidupan perorangan, tetapi juga lingkup makro kehidupan masyarakat. Demikian juga, sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim, tetapi juga mereka yang beragama lain. Janganlah mendorong minoritas untuk semakin memiliki *inferiority-complex*. Berilah mereka kesempatan untuk berkembang serta perlakukanlah mereka secara adil.

Sikap Wahid yang terkesan membela kaum minoritas telah menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan, terutama pada gerakan Islam formal. Sikap Wahid tersebut, semata-mata sebagai implementasi pemahaman secara fungsional terhadap al-Qur'an maupun Sunnah Rasul s.a.w. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap kaum minoritas; menuntut hak yang sama bagi mereka sebagai warga negara, semata-mata demi tegaknya keadilan yang merupakan prasarat bagi demokrasi. Wahid berujar:

"Salah satu tuduhan yang sering dilontarkan adalah kerja sama saya yang erat dengan berbagai golongan, termasuk kalangan Kristen. Jawaban atas tuduhan itu sederhana saja: saya justru berpegang pada al-Qur'an dan Hadits Nabi s.a.w.. Bahwa, keseluruhan al-Qur'an menekankan

pentingnya perlindungan pada kelompok-kelompok minoritas. Bukankah tuntutan mengistimewakan Islam justru bertentangan dengan prinsip perlindungan ini?"

Oleh karena itu, hargai pula pluralitas, dengan menganggap orang yang ada di luar sebagai orang mandiri. Isu semacam Muslim-nonMuslim, pribumi-nonpribumi maupun kristenisasi, sebenarnya muncul dari semangat sektarianisme. Padahal, Indonesia adalah negeri yang plural dan warganya hidup dalam pluralisme. Pluralisme terjaga kalau demokrasi, dan demokrasi akan terwujud bila ada keadilan. Mengutip pernyataan Mujamil Qamar, kita kaya dan kuat karena menjaga jiwa pluralistik, maka seyogyanya pula bagi umat Islam sebagai mayoritas bangsa ini untuk menjaga jiwa pluralistik tersebut.

Sebaliknya, kalau suatu masyarakat itu demokratis, Islam akan terjamin. Ini merupakan *appeal* kepada orang yang fanatik, yang sedang mencari identifikasi Islam. Dalam kehidupan masyarakat yang luas dan harmonis yang masing-masing unsur menghargai unsur lainnya, rasanya tidak mungkin umat Islam membentuk komunitas sendiri yang terpisah dan terputus hubungan sosialnya dengan komunitas lainnya. Jika itu yang terjadi, rasa sentimen agama justru berkembang dengan subur dan menjadi ancaman serius bagi keharmonisan kehidupan masyarakat yang plural.

Karena itu, selain harus berjiwa pluralistik, umat Islam pun harus berjiwa inklusif, artinya mau mengambil kebenaran dari pihak lain, yang mungkin nilai kebenarannya tersebut di hadapan Tuhan sama. "Ambilah hikmah dari mana saja datangnya", demikian ungkapan Ali ibn Abi Thalib. Jangan memonopoli kebenaran, karena sebagaimana Wahid menjelaskan, memonopoli kebenaran tidak diterima oleh ajaran agama manapun, sebagaimana juga ditolak oleh demokrasi, apalagi memaksakan sebuah kehendak, seperti keinginan penegakkan Syariat Islam atau yang lainnya, karena merasa diri sebagai mayoritas bangsa ini. Menurut Wahid, sebagai mayoritas, kita juga harus melindungi umat yang minoritas, sementara itu, antar umat beragama perlu dibuat lembaga antar umat beragama. Islam yang ideal menurutnya adalah Islam yang berfungsi secara alami dan wajar, mengayomi semua orang, dan tidak bisa disekat-sekat oleh lembaga. Inilah format Islam yang diinginkan. Dengan pandangan seperti ini, umat Islam akan mampu tampil untuk mengatasi segala bentuk ketidakbenaran dan mampu menegakkan keadilan seadil-adilnya untuk semua elemen bangsa ini, dan akhirnya tercipta sebuah yang demokratis.

Pribumisasi Islam: Perkawinan Agama dan Budaya

Pada akhir tahun 1980-an tema "Pribumisasi Islam" pernah dilontarkan oleh Wahid. Sebagaimana pemikiran Wahid lainnya, gagasan pribumisasi Islam itu pun menuai pro dan kontra, terutama ketika *assalamu'alaikum* disamakan dengan *ahlan wa sahlam* atau *shabah al-khayr*. Artinya kata Wahid, *assalamu'alaikum* dapat diganti "selamat pagi" atau "apa kabar". Gagasannya untuk pribumisasi Islam ini karuan saja membuat geger kalangan NU. Sampai akhirnya pada 8-9 Maret 1989 sekitar 200 Kiai berkumpul di Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon untuk "mengadili" Wahid. Tetapi sebagaimana diakui oleh Wahid sendiri, dia bukanlah orang pertama yang memulai. Dia adalah generasi pelanjut dari langkah strategi yang pernah dijalankan Walisongo. Dengan langkah pribumisasi, menurutnya, Walisongo berhasil mengislamkan tanah Jawa, tanpa harus berhadapan dan mengalami ketegangan dengan budaya setempat.

Problematika di sekitar gagasan ini tentu saja, sangatlah rumit dan tidak terbatas pada keharusan mempertemukan agama dan kebudayaan (baca: adat), sebagaimana tampak dalam kasus "selamat pagi" di atas. Lebih penting dari itu semua, Wahid bermaksud mencari wajah Islam Indonesia yang memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia, berbagai masalah, dan tantangan-tantangannya di masa depan berikut cara pemecahannya.

Untuk memahami maksud tersebut, terlebih dahulu harus dipahami hubungan antar agama dan kebudayaan. Dalam konsepsi Harun Nasution, hubungan keduanya walaupun sumbernya berbeda

adalah saling mempengaruhi. Diketahui bahwa Islam bersumber pada wahyu yakni al-Qur'an yang turun dari langit (Allah SWT) dan al-Hadits yang merupakan penjabaran dari al-Qur'an. Kaum Muslim pun sadar benar terhadap pesan Rasul s.a.w., yang menegaskan bahwa kaum Muslim tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh kepada keduanya. Namun harus dipahami, bahwa pada setiap wilayah atau tempat, tempat kedua pedoman tersebut dipahami dan dipraktikkan, telah ada terlebih dahulu berbagai paham dan tradisi yang telah berurat dan berakar. Berbagai pengaruh baik budaya maupun agama yang telah masuk sebelumnya memberi warna dan corak terhadap kaum Muslim dalam memahami keduanya. Hal ini terjadi hampir di seluruh dunia Islam, termasuk juga Indonesia.

Sebagai agama, Islam adalah sesuatu yang datang dari Tuhan untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam mencapai kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Sedangkan kebudayaan ialah semua produk aktivitas intelektual manusia untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup duniawi. Walaupun antara agama (baca: Islam) dan kebudayaan memiliki identitas sendiri-sendiri, di antara keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Corak dan warna kebudayaan dipengaruhi oleh agama, dan sebaliknya, pemahaman agama dipengaruhi pula oleh tingkat kebudayaan.

Harus disadari bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan bersifat *ambivalen* (mendua rasa). Satu sisi agama menjadikan kebudayaan sebagai sarana untuk mengenal, mengetahui, dan mengagungkan Tuhan serta mengekspresikan rasa indah akan hubungan manusia dengan-Nya. Bukankah ikon, patung, lukisan, kaligrafi, dan prosesi keagamaan merupakan ungkapan rasa keagungan manusia kepada Tuhannya? Begitu juga dengan teologi, mistik, hukum, dan lainnya, memiliki makna yang tidak berbeda dengan tujuan tersebut. Pada sisi yang lain, adanya kekurangharmonisan hubungan antara keduanya, yaitu antara norma yang ingin diterapkan dan kondisi manusia yang mengembangkan kebudayaan terdapat ketidaksesuaian. Kisah pembunuhan terhadap Suhrawardi al-Maq'tul, Mansur al-Hallaj, Dzunnun al-Misri, Ibnu 'Arabi, dan begitu juga dengan Syaikh Siti Jenar di Indonesia, dengan tuduhan ahli bid'ah, menunjukkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara keduanya.

Untuk memahami hubungan antara agama (baca: Islam) dengan kebudayaan, menurut Wahid, harus dipahami terlebih dahulu watak dasar dari ajaran Islam itu sendiri. Watak dasar tersebut dapat ditemukan dalam kenyataan, bahwa Islam adalah *religion of law* (agama hukum). Karena itu, Islam berpandangan serba *normative* dan orientasinya yang serba legal formalistik. Islam harus diterima secara utuh, dalam arti seluruh hukum-hukumnya harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada semua tingkatan. Pada watak dasar inilah, terjadi hubungan dilematis antara Islam dengan kebudayaan sejak dulu hingga kini.

Disadari atau tidak, situasi dilematis ini semakin berat dihadapi oleh kaum Muslim saat ini, terutama dalam menghadapi arus zaman yang serba global dan plural. Dalam menyikapi keadaan yang demikian berkembang tiga sikap, yaitu:

Pertama, sikap yang menegaskan bahwa agama (Islam) harus tunduk kepada *nash*, dengan alasan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna yang tak memerlukan konsep atau ajaran dari pihak lain. Pada kelompok ini, ada kecenderungan yang cukup kuat untuk memberlakukan sumber tekstual, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul s.a.w. secara harfiah (*literal, tektual*). *Kedua*, sikap yang menegaskan bahwa agama dan kebudayaan harus berjalan sendiri-sendiri karena tujuannya berasal dari sumber yang berbeda dan tak mungkin disatukan. *Ketiga*, sikap yang berusaha untuk memadukan antara agama dan kebudayaan. Pada kelompok ini berkembang keinginan untuk tidak langsung menerapkan sumber-sumber tekstual secara harfiah belaka, melainkan dengan mencari cara-cara penyesuaian sumber-sumber tekstual itu pada kenyataan yang ada. Dalam wacana Islam ke-Indonesiaan, Wahid memilih yang ketiga. Dia menjelaskan, bahwa sebagai titik tolak dari upaya rekonsiliasi adalah meminta agar wahyu dipahami dengan mempertimbangkan faktor kontekstual, termasuk

kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dan pribumisasi Islam yang dilontarkannya adalah sebuah upaya untuk merekonsiliasi antara Islam dengan kebudayaan.

Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Bagi Wahid, pribumisasi Islam merupakan pengejawantahan untuk memadukan agama dan kebudayaan lokal (baca: Indonesia), yang berarti pula, upaya pencarian Islam yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan, yaitu Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, etnis, dan agama, dan menghasilkan budaya yang beragam pula. Dari sinilah kemudian dia menekankan pentingnya keterbukaan (inklusivitas) dalam beragama.

Perlu digarisbawahi, pribumisasi Islam bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Karena itu, inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan. Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya yang otentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antara agama dan budaya.

Ada beberapa alasan mendasar, Wahid mendeklarasikan pribumisasi Islam, yang menurut hemat penulis perlu diketahui. *Pertama*, dalam pandangan Wahid, islamisasi di Indonesia yang terlihat akhir-akhir ini, pada umumnya baru pada arabisasi budaya, yaitu semakin banyak dipakainya terminologi Arab yang berasal dari *nash*. Proses pengidentifikasian diri dengan budaya Timur Tengah (arabisasi), menurut Wahid harus dihindarkan, karena akan menghilangkan jati diri dari akar budaya sendiri. Lebih dari itu arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Akibatnya Islam justru tampak sebagai sesuatu yang asing dan sulit melakukan adaptasi dengan lingkungan budaya setempat. Bahkan dalam persepsi Barat, menurut Jefry Lang, Islam sebagai sebuah agama yang semata-mata bercorak Timur Tengah, dan ini menghilangkan substansi Islam sebagai ajaran *rahmatan li al-'alamin*, rahmat bagi semesta. Dan pada gilirannya, sebagaimana dijelaskan oleh Mujamil Qamar, bahwa Islam akan kehilangan kesempatan yang baik untuk didakwahkan kepada masyarakat yang senantiasa melestarikan budaya. Karena itu, harus dibuat kategorisasi mana yang memang termasuk kategori Syari'at Islam, dan mana pula yang termasuk kategori budaya Arab.

Kedua, stuasi sosio-kultural, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad AS Hikam, karena secara sosio-politik Indonesia, tidak memungkinkan penggunaan pemikiran absolutis, tetapi fleksibel. Hal ini dimaksudkan, karena saat ini masyarakat Indonesia mengalami transisi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern. Perkembangan yang terjadi di sini bersifat dualistik, di satu pihak, keinginan mencapai modernitas dalam segala aspek sampai terkadang mengorbankan norma-norma agama, tetapi di pihak lain, perilaku feodal masih dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai akar ke masa lampau. Dalam situasi perkembangan dualistik ini, menurut Wahid, hukum Islam akan berfungsi dengan baik apabila ia dikaitkan dengan perubahan struktur masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini menyangkut kemampuan kaum Muslim untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi oleh bangsa dan bukan memaksakan agendanya sendiri. Karena itu patut diusulkan agar terlebih dahulu kaum Muslim menekankan pembicaran tentang keadilan, demokrasi, dan persamaan.

Kedua alasan Wahid tersebut berdasarkan pada formulasi syari'ah (sebagaimana sistem perundang-perundangan lainnya), dan hal ini menurut Abdullahi Ahmed al-Na'im, sebenarnya mengikuti tahap-tahap perkembangan umat. Teknik-teknik penjabaran syari'ah dari sumber sucinya dan cara-cara menyusun konsep dan prinsip fundamentalnya, jelas merupakan produk proses sejarah intelektual, sosial dan politik umat Islam. Dengan langgam pemahaman seperti ini kita dapat mengerti hikmah di balik penciptaan syari'ah yang berjenis-jenis bagi para rasul sebagai pembawa resmi ajaran-ajaran Tuhan. Islam sebagai bagian dari bangsa ini, dalam keyakinan Wahid adalah ajaran yang dapat

menampung aspirasi umat dari berbagai lapisan masyarakat berikut budayanya. Karena itu, Islam harus dipahami secara kontekstual dan liberal, bukan malah sebaliknya. Pemahaman Islam yang hanya mengandalkan dan terpaku kepada tekstualitas *nash* suci, mengindikasikan pemaksaan aturan agama terhadap manusia. Padahal inti dari agama adalah keikhlasan bukan keterpaksaan.

Karena itu, Wahid menganjurkan pemahaman yang mendalam terhadap *Ushul al-Fiqh* dan *Qaidah al-Fiqh*. Dia menjelaskan:

"Inti dari pribumisasi Islam adalah kebutuhan, dan ini jangan diartikan sebagai 'jawanisasi' atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukannya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman terhadap nash dengan tetap mempergunakan Ushul al-Fiqh dan Qaidah al-Fiqh. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan ghaib berikut dimensi eskatologinya dengan Islam, yang lalu membuat bentuk panteisme."

Walupun Islam harus dipahami secara kontekstual dan liberal bukan berarti bisa dilakukan pada semua aspek Islam. Ada bagian yang harus dipertahankan dalam bentuk aslinya. Dalam proses ini Wahid tidak menyetujui bila Islam dicampuradukkan dengan budaya, karena akan menghilangkan keaslian Islam, dia menjelaskan:

"Dalam proses ini pembauran Islam dan budaya tidak boleh terjadi, berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Al-Qur'an harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam shalat, sebab hal ini telah menjadi norma, sedang terjemahan al-Qur'an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-Qur'an itu sendiri."

Pribumisasi Islam Wahid, merupakan pemaknaan Islam yang sesuai dengan kondisi ke-Indonesia-an, dengan mengembangkan aplikasi *nash* baik al-Qur'an maupun al-Hadits, dengan cara menggunakan pemahaman kontekstual. Misalnya, Rasul s.a.w. tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat melainkan gandum. Lalu para ulama mendefinisikan gandum sebagai *quth al-bilad*, makanan pokok, definisi tersebut, gandum berubah menjadi beras untuk Indonesia.

Kontekstualisasi *nash*, bukanlah hal baru, Khalifah ke-2, Umar ibn al-Khattab r.a. telah memulainya, bahkan keputusannya tersebut kadangkala bertolak belakang dengan al-Qur'an maupun al-Hadits, seperti dalam masalah tawanan perang Badar dan perlakuan atas jenazah Abdullah ibn Ubay. Tradisi ini pun kemudian dikembangkan kembali oleh generasi-generasi sesudahnya. Di antaranya, adalah imam madzhab yang empat, yaitu, Imam Abu Hanifah (81-150 H./700-767 M.), Imam Malik ibn Anas (93-179 H./713-795 M.), Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150-204 H./767-820 M.), dan Imam Ahmad ibn Hambal (164-241 H./780-855 M.); dengan dilegalkannya *al-qias*, *al-istihsan*, *al-'uruf*, *al-istishlah*, *al-dzari'ah*, dan *al-istishab* sebagai metodologi kajian hukum Islam. Walaupun secara teknis berbeda satu sama lain, substansinya tetap sama, yaitu pengaplikasian Syari'at Islam agar bisa diterima di berbagai tempat dan zaman. Bahkan di Indonesia, penyebaran Islam yang dipelopori oleh Walisongo mengikuti tradisi tersebut. Jadi, pribumisasi Islam yang dilakukan oleh Wahid tidak jauh berbeda dengan metode dakwah Walisongo.

Di atas telah disinggung bahwa Islam dalam kenyataannya memiliki watak dasar, *religion of law* (agama hukum). Karena itu, Islam berpandangan serba *normative* dan orientasinya yang serba legal *formalistic*. Lantas di manakah pribumisasi Islam tersebut diletakan? Menurut Wahid, ajaran Islam bisa dibedakan antara yang merupakan nilai dasar dan kerangka operasionalisasinya. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat, yang intinya adalah (menurut Muhammad Abu Zahrah dan diperkuat oleh ahli lain) keadilan, persamaan, dan demokrasi (syura). Prinsip operasionalisasi nilai dasar ini sudah dirumuskan dalam kaidah fiqh, "*tasharruful imam 'ala ra'iyatihi manuthun bil mashlahah*" (tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan

kesejahteraan mereka). Dengan bahasa sekarang, harus dijunjung tinggi nilai demokrasi, keadilan sosial, dan persamaan di muka undang-undang. Jadi *Weltanschauung* Islam sudah jelas, yaitu bahwa Islam mengakomodasikan kenyataan yang ada sepanjang membantu atau mendukung kemaslahatan rakyat. Prinsip ini harus mewarnai segala wujud, baik bentuk kelembagaan maupun produk hukum.

Tiga nilai dasar, yaitu keadilan, persamaan, dan demokrasi (*weltanschauung*) itu diejawentahkan ke dalam sikap hidup yang mengutamakan Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan. Prinsip operasional "*tasharruful imam 'ala ra'iyatihi manuthunbil-mashlahah*", dirinci dalam sub-sub prinsip hingga menjadi kerangka operasional dari *Weltanschauung* Islam tersebut. Di sinilah kultur-Islam hendaknya diisikan. Demikian penjelasan Wahid.

Bila ada pertentangan antara keduanya, Wahid menawarkan sebuah gagasan untuk memadukan atau menyelaraskan antara agama dan kebudayaan, yaitu: *Pertama*, membuat ukuran mengenai apa yang harus dilakukan. Rumusan ukurannya adalah hal yang mengagungkan (meninggikan martabat atau posisi) kemanusiaan haruslah diutamakan. Manifestasinya dengan memelihara hak azasi manusia dan mengembangkan struktur masyarakat yang adil, tempat kaum Muslim hidup. Ukuran di atas berperan sebagai kuasi-norma (bukan norma, tapi perannya seperti norma). Kalau perkembangan zaman atau kebudayaan tidak sesuai ukuran itu, maka harus dihentikan. Juga sebaliknya, jika kebetulan ajaran agama yang justru melakukannya, maka ukuran tadi pun mesti mengeremnya. *Kedua*, merumuskan kembali kedudukan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut perumusan ini, hukum Islam tidak dijadikan hukum nasional *intoto*. Hanya partikel-partikel yang dapat diterima semua pihak sajalah yang diundangkan oleh negara, sedangkan selebihnya menjadi etika masyarakat bagi kaum Muslim. Cara penerapan hukum Islam tersebut sebagai salah satu unsur pembentukan hukum dalam konsep negara-bangsa (*nation state*). Ini merupakan kunci pemecahan masalah. Di sinilah pentingnya pribumisasi Islam.

SIMPULAN

Secara umum, pemikiran Islam dan pluralitas Abdurrahman Wahid bermula pada pemahaman kepada Islam, yang intinya adalah bahwa seluruh risalah samawi yang diturunkan disebut Islam, yang dalam arti umumnya berarti penyerahan diri secara sempurna atau ketundukan penuh kepada perintah Allah. Sementara Islam yang digunakan dalam makna spesifik mengacu kepada versi Islam terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa dalam keyakinan Wahid, Islam yang diwahyukan kepada Muhammad s.a.w. lah adalah yang terbaik. Islam yang dimaksud oleh Wahid adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang *terbuka, luwes, dan toleran*. Terbuka memiliki makna bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk mengkritisnya, jika kebenaran atau hikmah yang disampaikan tersebut, maka seorang muslim harus berlapang dada untuk menerimanya, dari siapa atau apa pun datangnya. Luwes bermakna mau berhubungan dengan pihak lain, tanpa rasa canggung, dan juga tanpa melihat perbedaan yang ada, baik agama, kepercayaan, maupun asal usul. Toleran bermakna menghormati perbedaan yang ada, baik dengan yang seagama atau sekeyakinan maupun dengan yang berbeda agama atau keyakinan. Pemahaman yang demikian bertolak dari nilai-nilai dasar Islam, dengan ide yang utama "Islam sebagai ajaran kasih sayang untuk dunia" (*rahmatan lil 'alamin*). Implikasi dari pemikiran Islam dan pluralitas adalah keberanian untuk membongkar selubung kusam berupa dunia penghayatan Islam yang bercorak doktrinal dan dogmatis. Pemahaman dan pelaksanaannya lebih menekankan kepada *nilai dasar Islam*, bukan kepada simbol belaka. Penekanan yang berlebihan atau keterjebakan terhadap simbol keagamaan justru mengandung bahaya kontraksi, distorsi, dan reduksi ajaran agama itu sendiri, semangat penekanan terhadap simbol agama tersebut sering sekali tidak sesuai dengan substansi ajaran agama itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F., dan Effendi, B. (1992). *Merambah Jalan Baru, Rekonstruksi Pemikiran Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Al-Na'im, A. A. (2001). *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rany (penerj.). Yogyakarta: LkiS.
- Barton, G. (2003). *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. cet ke-2. Lie Hua (penerj.). Yogyakarta: LkiS.
- Effendy, B. (2001). *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan, Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*. Cetakan kesatu. Yogyakarta: Galang Press.
- Hanafi, H. (2003). *Cakrawala Baru Peradaban Global, Revolusi Islam untuk Globalisme, Pluralisme, dan Egaliterisme antar Peradaban*, Muhammad Saeful Anam dan Abduh (penerj.). Yogyakarta: IRCiSoD, cetakan pertama.
- Hidayat, K. (2003). Cak Nur dan Gus Dur dalam Sukandi A.K. (ed.). *Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lang, Jeffrey. (2001). *Bahkan Malaikat pun Bertanya, Membangun Sikap Islam yang Kritis*, Abdullah Ali (penerj.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, cetakan kedua.
- Qamar, M. (2002). *NU "Liberal", dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, cetakan pertama.
- Sachedina, A. A. (2002). *Kesetaraan Kaum Beriman, Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*, Satrio Wahono (penerj.). Jakarta: Serambi, cetakan pertama.
- Schoun, F. (2003). *Mencari Titik Temu Agama-agama*, Saafroedin Bahar (penerj.). Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan keempat.
- Shihab, A. (1998). *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, cetakan keempat.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, cetakan kedelapan.
- Siradj, S. A. (1997). *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM.
- Sobari, M. Merombak Primordialisme Agama dalam Th. Sumartana, dkk. (1994). *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama.
- Suaedy, A., dkk. *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*. (1994). Yogyakarta: Intitut Dian/Interfidai, cetakan pertama.

- Suseno, F. M. (2003). Membongkar Kedok Pluralisme, Merayakan Inklusifisme. Dalam Majalah Rohani, A. Sudiarja dan A. Bagus Laksana (ed.), *Berenang di Arus Zaman, Tantangan Hidup Religius di Indonesia Kini*. Yogyakarta: Kanisius, cetakan pertama.
- Taha, M. M. (1996). *The Second Massage of Islam: Syari'ah Demokratik*, Nur Rahman (penerj.). Surabaya: eLSAD, 1996), cetakan pertama.
- Tashwirul, Afkar. (2003). *Islam Pribumi, Menolak Arabisme, Mencari Islam Indonesia*. Jakarta: LAKPESDAM dan TAF. Edisi No. 14 Tahun 2003.
- Thoha, Z. A. (2003). *Jagadnya Gus Dur, Demokrasi, Kemanusiaan, dan Pribumisasi Islam*. Yogyakarta: Kutub, cetakan pertama.
- Tim Inces. (2000). *Beyond the Symbols, Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: Remaja Rosdakarya dan Inces, cetakan pertama.
- Wahid, A. (1994). *Agama dan Demokrasi*. Ahmad Suaedi, dkk. (ed.). *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidai, cetakan pertama.
- Yahya, S. U. (2000). Mujadid Indonesia, dalam dalam Tim INCREs, *Beyond The Symbol, Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: Remaja Rosdakarya dan INCREs, cetakan pertama.